

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Banten merupakan salah satu pusat perekonomian nasional dengan basis industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi yang termasuk terbesar di Indonesia. Selain itu, Banten juga menempati posisi ke-4 sebagai provinsi dengan jumlah industri besar dan sedang terbanyak. Secara logika ekonomi, kondisi ini seharusnya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan dan menurunkan angka pengangguran. Masalah ini menjadi penting untuk dikaji karena secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dan ekspansi industri seharusnya mampu menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi pengaruh variabel upah minimum kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi, dan industri besar sedang terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Sebagai provinsi dengan pengangguran tertinggi di tanah air, Banten menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonominya. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan industri yang signifikan, masalah pengangguran di wilayah ini tetap menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Banyaknya penduduk yang belum mendapatkan kesempatan kerja mencerminkan ketidakefektifan dalam pengelolaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Dengan tingginya angka pengangguran, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata menjadi tujuan yang seakan sulit tercapai.

Pengangguran merupakan salah satu tantangan utama dalam makroekonomi karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai isu global, pengangguran menjadi perhatian utama dalam setiap upaya Pembangunan

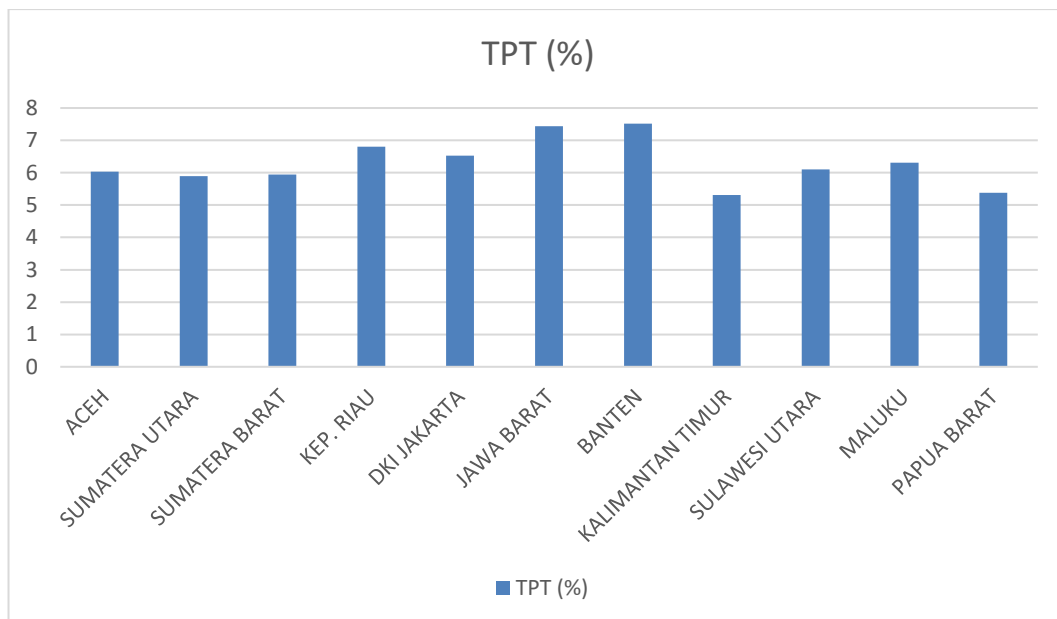
ekonomi suatu negara (Kurnia, 2021). Oleh karena itu, pemerintah dan pembuat kebijakan menjadikannya sebagai prioritas, dengan merancang berbagai program untuk memperluas kesempatan kerja (Wahab et al., 2022). Permasalahan ini semakin mendesak karena konsekuensinya dapat memicu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Lamatenggo et al., 2019). Untuk menurunkan angka pengangguran di Banten, diperlukan analisis menyeluruh seperti pertumbuhan ekonomi agar langkah yang diambil dapat tepat sasaran dalam menurunkan angka pengangguran di Banten (Bastari, 2019). Selain itu, efektivitas kebijakan dari pemerintah daerah juga memegang peranan penting dalam menekan tingkat pengangguran (Taufik Asri & Haryatiningsih, 2024). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemajuan ekonomi daerah yang idealnya dapat meningkatkan peluang kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Berdasarkan berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, hubungan antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Pertumbuhan Ekonomi dan industri besar sedang terhadap tingkat pengangguran masih menjadi topik yang diperdebatkan di kalangan akademisi. Temuan berbeda dikemukakan oleh Suhendra & Wicaksono (2020) serta Mulya Pratomo & Setyadharma (2020), yang menyatakan bahwa UMR, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Hertzmark & Chavez (2018) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap pengangguran, artinya, peningkatan PDRB cenderung menciptakan lapangan kerja dan angka pengangguran menjadi turun. Hal tersebut sejalan relevan dari teori yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat memperluas kesempatan

kerja. Selaras dengan itu, Pramudjasi (2019) menyimpulkan bahwa kenaikan upah yang dikelola secara proporsional dapat membantu menekan tingkat pengangguran, karena upah yang lebih baik meningkatkan daya beli masyarakat tanpa menghambat perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan.

Selain itu, industri besar dan sedang juga berperan penting dalam mempengaruhi tingkat pengangguran. Peningkatan jumlah industri besar dan sedang di suatu daerah seharusnya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran. Namun, dalam praktiknya, jika industri yang berkembang lebih mengandalkan otomatisasi dan teknologi dibandingkan tenaga kerja manusia, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja bisa lebih kecil dari yang diharapkan. Dengan demikian, pengaruh UMK, Pertumbuhan Ekonomi, dan industri besar serta sedang terhadap tingkat pengangguran sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan yang diterapkan. Jika kenaikan UMK tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas, maka pengangguran dapat meningkat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang pesat serta industri yang berkembang dengan kebijakan tenaga kerja yang inklusif dapat secara efektif menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang seimbang agar kenaikan upah, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan industri dapat berjalan selaras dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Dalam 10 Provinsi Terbesar



Sumber : BPS Provinsi Banten

Gambar ini menunjukkan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di beberapa provinsi di Indonesia, yang mencerminkan perbedaan situasi ketenagakerjaan di setiap wilayah. Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Banten dengan angka lebih dari 7%, menandakan adanya kesulitan besar dalam menyediakan lapangan kerja. Selain itu, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur juga memiliki TPT yang tinggi, mendekati 7%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti urbanisasi yang padat di Jakarta atau dominasi sektor industri di Kalimantan Timur yang bisa terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi.

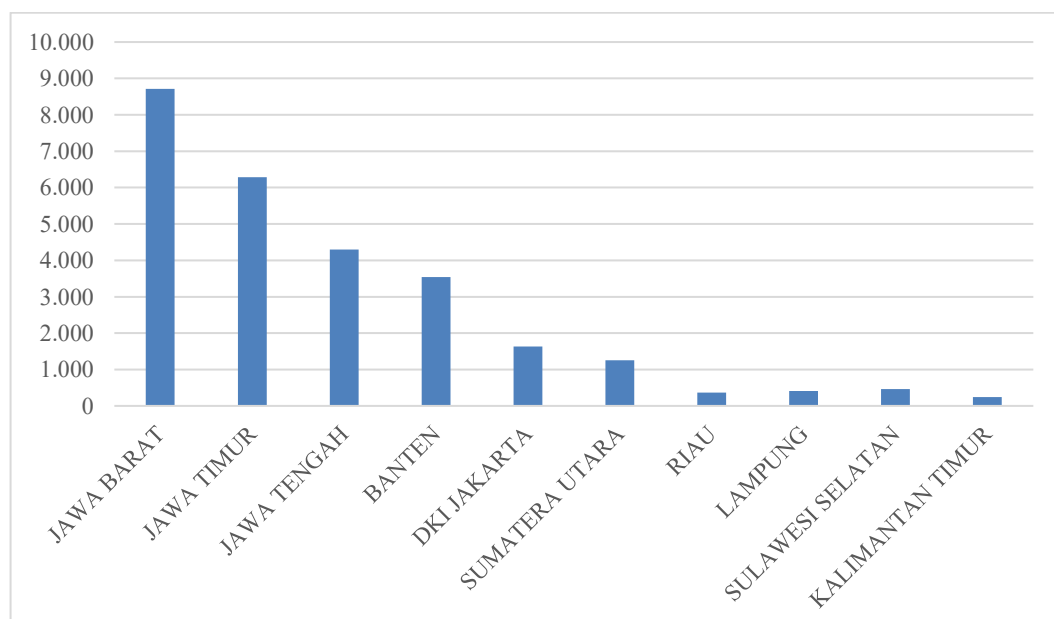
Sementara itu, provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki TPT yang lebih rendah, sekitar 5%, yang menunjukkan stabilitas dalam pasar kerja atau tingginya kontribusi sektor informal di wilayah tersebut. Di wilayah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua Barat, tingkat pengangguran berada di kisaran 5-6%, yang tergolong sedang jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Meskipun lokasinya terpencil, tingkat pengangguran di kedua provinsi ini tidak setinggi daerah dengan populasi besar seperti DKI Jakarta. Secara keseluruhan, sebagian besar provinsi memiliki tingkat pengangguran dalam rentang 5-7%, mencerminkan perbedaan dalam peluang kerja dan kondisi ekonomi di setiap wilayah. Data ini menunjukkan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan di masing-masing daerah.

Provinsi Banten menghadapi ironi serius dengan tingginya angka pengangguran terbuka, meskipun wilayah ini memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam, lokasi strategis, maupun kawasan industri yang berkembang pesat. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB, angka pengangguran yang tinggi di Banten mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan daerah tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Tingginya pengangguran di tengah besarnya potensi Banten menandakan kurangnya sinkronisasi antara perencanaan ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, kurang efektifnya pemerintah daerah dalam menciptakan peluang kerja di sektor industri serta mengelola urbanisasi yang cepat menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Kajian lebih mendalam dibutuhkan untuk mengevaluasi mengapa pertumbuhan PDRB belum berhasil menekan angka pengangguran dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah ini. Pertumbuhan PDRB menggambarkan kemajuan ekonomi daerah yang idealnya dapat meningkatkan peluang kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, kebijakan penetapan Upah Minimum Regional (UMR) diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, sektor Industri Besar dan Sedang (IBS) memainkan peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Namun, data empiris menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan kenyataan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, tingkat pengangguran di Banten pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,52% , meskipun PDRB di berbagai wilayah di Banten mengalami peningkatan rata-rata sebesar 69% setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dapat mendorong penyerapan tenaga kerja secara maksimal. Kenaikan UMR juga menghadirkan tantangan tersendiri. Pada tahun 2023, peningkatan rata-rata UMR sebesar 7,62% di sejumlah wilayah justru diikuti oleh kenaikan angka pengangguran di sektor formal, disebabkan oleh beban biaya operasional yang semakin tinggi bagi perusahaan.

Gambar 1.2
Industri Besar dan Sedang Dalam 10 Provinsi Terbesar



Sumber: BPS Provinsi Banten

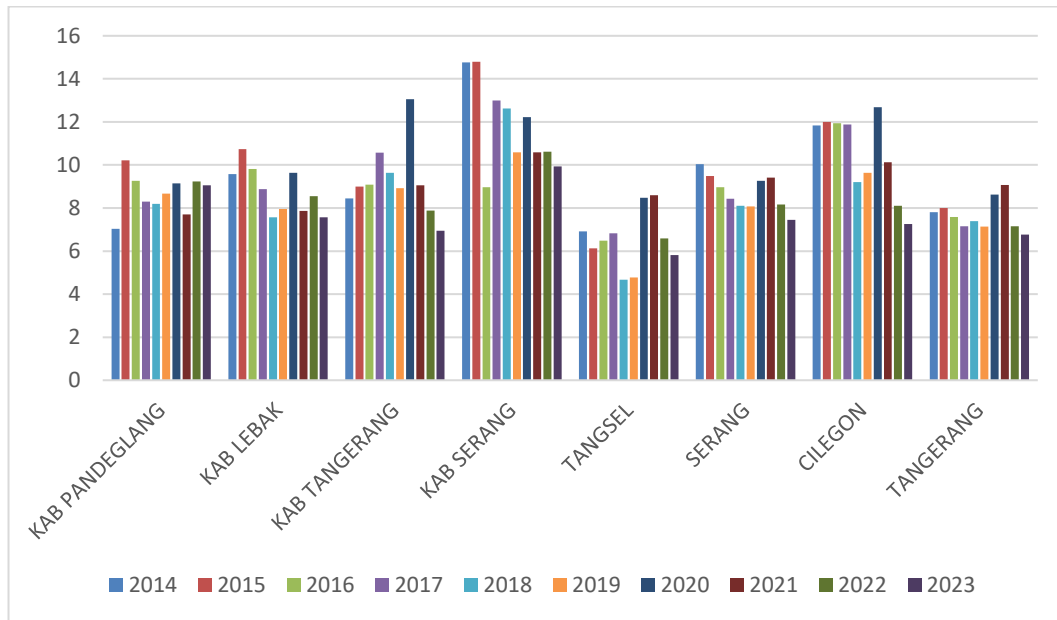
Gambar tersebut menunjukkan jumlah industri besar dan sedang di berbagai provinsi di Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah industri terbanyak, hampir mencapai 10.000 unit. Dominasi ini didukung oleh infrastruktur yang baik, akses ke pasar yang luas, dan banyaknya tenaga kerja. Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di posisi kedua dan ketiga dengan sekitar 7.000 dan 4.000 unit industri. Letak strategis kedua provinsi ini sebagai penghubung wilayah timur dan barat Indonesia turut membantu perkembangan industrinya. Provinsi lain seperti Banten dan DKI Jakarta juga memiliki jumlah industri yang cukup besar, meskipun masih di bawah Jawa Barat. Sementara itu, provinsi di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur, memiliki jumlah industri yang jauh lebih sedikit. Sumatera Utara mencatat jumlah yang lebih tinggi dibanding provinsi lain di luar Jawa, tetapi tetap tertinggal dibandingkan provinsi di Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri masih terpusat di Pulau Jawa. Penyebabnya bisa terkait dengan akses yang lebih baik ke pelabuhan, jalan, dan pasar utama. Untuk mengurangi kesenjangan ini, perlu ada upaya lebih untuk mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa.

Selain itu, sektor Industri Besar dan Sedang, yang seharusnya menjadi tulang punggung penyediaan lapangan kerja, masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya tingkat investasi di beberapa daerah. IBS di Banten memberikan kontribusi besar terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Dengan kawasan industri utama seperti Cilegon dan Tangerang, Banten menjadi pusat manufaktur di sektor petrokimia, otomotif, dan makanan-minuman. Namun, meski IBS memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, tingkat pengangguran di Banten masih tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain, meskipun sektor ini terus berkembang.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan IBS belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi pengangguran lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penguatan sektor Industri Besar dan Sedang, tetapi juga pada upaya pemberdayaan tenaga kerja lokal dan peningkatan keselarasan antara kebutuhan industri dengan kualitas sumber daya manusia di Banten.

Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan ini antara lain kebutuhan tenaga kerja di IBS sering memerlukan keterampilan khusus yang tidak banyak dimiliki tenaga kerja lokal, distribusi IBS yang terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Cilegon dan Serang, sehingga akses ke pekerjaan terbatas untuk daerah lain, serta dominasi sektor informal dan ketidakcocokan keterampilan di pasar kerja. Selain itu, kebijakan kenaikan UMR juga memengaruhi situasi ini. Beberapa perusahaan IBS menghadapi tekanan biaya yang membuat mereka mengurangi jumlah pekerja atau beralih ke teknologi otomatis. Sementara tujuan UMR adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja, dampaknya tidak selalu mendukung penyerapan tenaga kerja di industri. Kesenjangan antara IBS dan pengangguran di Banten menunjukkan perlunya langkah konkret. Pemerintah daerah dapat menyediakan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri, memperkuat kerja sama antara perusahaan dan lembaga pendidikan, serta mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah Banten. Dengan langkah ini, IBS dapat berperan lebih besar dalam mengurangi pengangguran di provinsi ini. Fakta bahwa Banten masuk dalam 10 besar provinsi dengan jumlah industri besar dan sedang terbanyak, perlu dianalisis lebih lanjut dengan melihat bagaimana kondisi tingkat pengangguran terbuka di tiap kabupaten/kota.

Gambar 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kota dalam persen

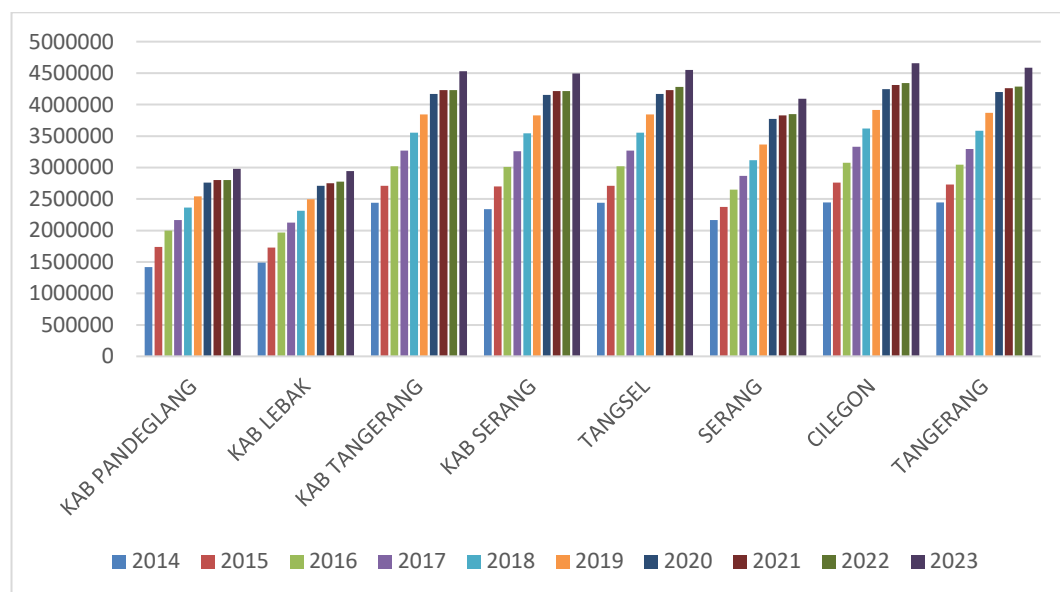


Sumber : BPS Provinsi Banten

Grafik ini menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam persentase di beberapa wilayah dari tahun 2014 hingga 2023. Data menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antarwilayah. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Serang dan Cilegon, cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Sebaliknya, Tangerang Selatan secara konsisten menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Selain itu, terdapat perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Lonjakan pengangguran yang tajam terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Setelah itu, TPT di banyak wilayah mulai menurun, menandakan adanya pemulihan ekonomi secara perlahan. Perbedaan besar antar wilayah menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi. Wilayah dengan TPT rendah cenderung memiliki ekonomi yang lebih kuat atau lebih banyak peluang kerja, sementara daerah dengan TPT tinggi menghadapi kesulitan menciptakan lapangan kerja.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan sektor ekonomi, tingkat urbanisasi, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja. Untuk mengurangi pengangguran dan ketimpangan antar wilayah, perlu adanya kebijakan khusus, seperti mendorong investasi di sektor produktif, mendukung pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Grafik ini menunjukkan pentingnya langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kesenjangan antarwilayah.

Gambar 1.4
Upah Minimum Regional Kabupaten Kota dalam rupiah



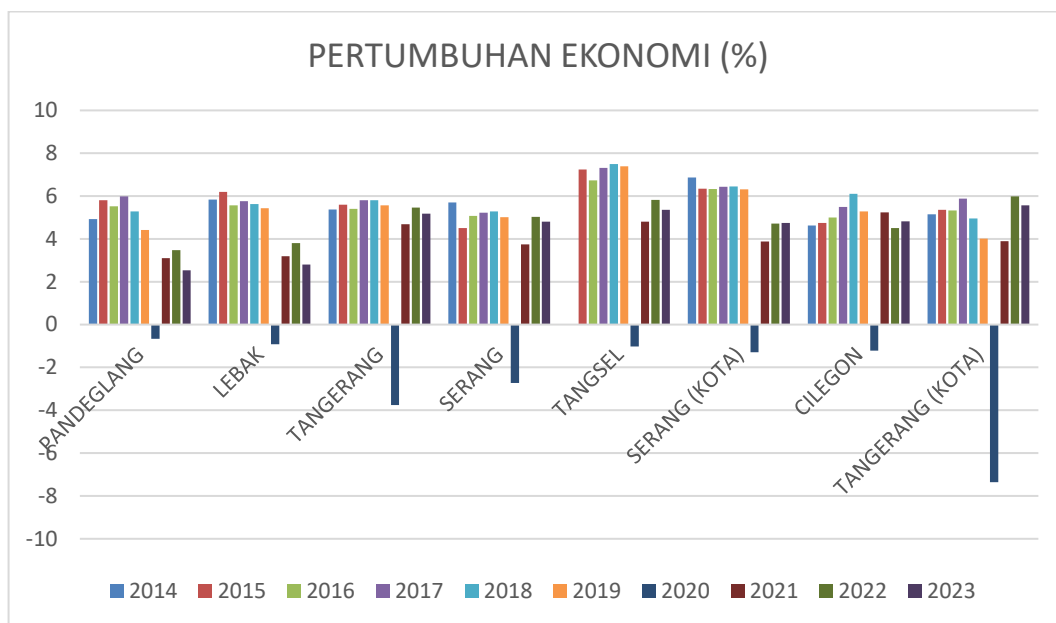
Sumber : BPS Provinsi Banten

Pada gambar 2 diatas dalam grafik tersebut menunjukkan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di berbagai wilayah Provinsi Banten dari tahun 2014 hingga 2023. Secara keseluruhan, UMR terus meningkat di semua wilayah, meskipun jumlahnya berbeda-beda. Kota Cilegon dan Tangerang memiliki UMR yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang dan Lebak memiliki UMR yang lebih rendah, menandakan adanya tantangan ekonomi yang berbeda di daerah tersebut. Kenaikan UMR diharapkan bisa meningkatkan

kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat. Namun, hal ini juga bisa menjadi tantangan bagi perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, karena mereka kesulitan menanggung biaya yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, kenaikan UMR yang terlalu besar dapat membuat perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau beralih ke teknologi otomatis. Grafik ini menegaskan pentingnya kebijakan yang seimbang, sehingga kenaikan UMR dapat mendukung kesejahteraan pekerja tanpa mengurangi kesempatan kerja di semua wilayah Banten.

Selanjutnya, Pertumbuhan Ekonomi juga memiliki komponen penting dalam mengatasi pengangguran. Menurut Sadono Sukirno (2015), pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan aktivitas ekonomi yang mendorong bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan. Pertumbuhan ini dapat diukur melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi acuan penting bagi suatu negara dalam menetapkan prioritas pembangunan guna mendorong pertumbuhan penyerapan input produksi, khususnya tenaga kerja. Ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung secara stabil, aktivitas ekonomi akan berkembang dan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka lebih banyak peluang kerja. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang positif perlu disertai dengan penciptaan lapangan kerja baru sebagai bentuk dukungan yang saling melengkapi. Kebijakan upah minimum tidak dapat dilepaskan dari kondisi pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga penting untuk meninjau bagaimana laju pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten

Gambar 1.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota



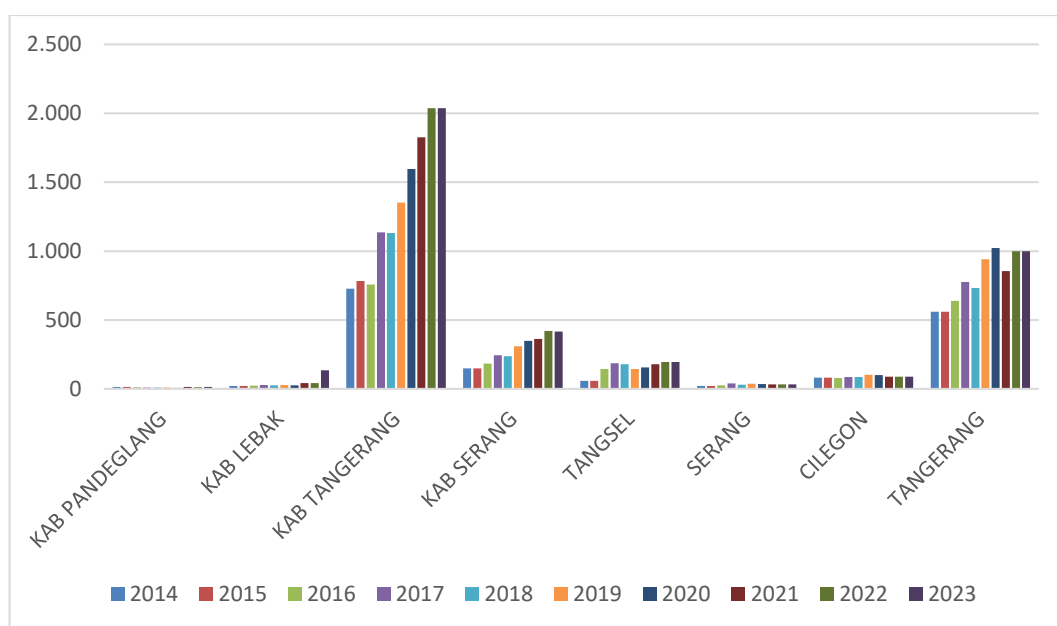
Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama saat terjadi pandemi COVID-19. Selama periode 2014 hingga 2019, seluruh wilayah baik kabupaten maupun kota seperti Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, Tangerang Selatan (Tangsel), Serang Kota, Cilegon, dan Tangerang Kota mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan positif. Rata-rata pertumbuhan berada di kisaran 4% hingga 7%, dengan Cilegon dan Serang Kota menunjukkan angka yang cenderung lebih tinggi dibanding wilayah lain karena keberadaan sektor industri yang kuat. Sebaliknya, Tangerang Kota cenderung menunjukkan angka pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya.

Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan bagaimana guncangan besar seperti pandemi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara drastis, dan bagaimana kemampuan setiap wilayah dalam beradaptasi serta struktur sektoral

ekonomi sangat menentukan kecepatan pemulihannya. Daerah dengan basis industri yang kuat seperti Cilegon cenderung lebih cepat pulih, sementara daerah dengan sektor jasa dominan seperti Tangerang Kota memerlukan waktu lebih panjang untuk mencapai stabilitas kembali. Grafik ini juga menggambarkan pentingnya diversifikasi ekonomi dan kebijakan pembangunan yang tanggap terhadap krisis guna menjaga kestabilan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Gambar 1.6
Industri Besar dan Sedang Kabupaten Kota



Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada gambar tersebut menunjukkan perkembangan jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Banten dari tahun 2014 hingga 2023, dengan distribusi yang tidak merata di setiap wilayah. Kabupaten Tangerang terlihat menjadi pusat utama industri, dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Jumlah industrinya terus meningkat setiap tahun, menunjukkan bahwa daerah ini memiliki peran penting sebagai pusat industri di Banten.

Ini menunjukkan bahwa kegiatan industri di Banten cenderung terpusat di wilayah-wilayah dengan infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik. Di sisi lain, wilayah seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki jumlah industri yang sangat sedikit, dengan pertumbuhan yang hampir tidak terlihat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perkembangan industri di Provinsi Banten, di mana beberapa wilayah tumbuh pesat, sementara yang lain tertinggal. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa perkembangan industri di Banten masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah provinsi. Meskipun Provinsi Banten sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor industri besar dan sedang yang terus berkembang. Namun, kenyataannya, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini belum mampu secara maksimal mengurangi angka pengangguran.

Provinsi Banten menghadapi persoalan serius berupa tingginya tingkat pengangguran meskipun memiliki basis industri besar, perdagangan, dan konstruksi yang kuat. Kebijakan kenaikan UMR yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja justru menghadirkan tantangan baru, seperti berkurangnya daya serap tenaga kerja di sektor formal. Permasalahan ini semakin diperburuk oleh ketidakmerataan lokasi industri, rendahnya investasi di sebagian daerah, serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Data menunjukkan bahwa meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten tumbuh rata-rata 6,9% per tahun dan UMR naik 7,62% pada 2023, tingkat pengangguran tetap tinggi di angka 7,52% (BPS Banten, 2023). Fakta ini menegaskan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah, dan

perkembangan industri dengan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan UMR, dan jumlah industri besar serta sedang terhadap tingkat pengangguran di Banten, guna menemukan solusi konkrit untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Upah Minimum Regional berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten?
3. Apakah pengaruh Industri Besar Sedang berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten
2. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten
3. Untuk menganalisis pengaruh Industri Besar Sedang terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menambah literatur dan wawasan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya Terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian akademik, khususnya

yang berhubungan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah

2. Bagi Penelitian, selanjutnya penelitian ini dapat menjadi dasar atau acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami topik serupa. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menambahkan variabel lain, menggunakan metode yang berbeda, atau memperluas cakupan wilayah penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
3. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menekan tingkat pengangguran. Pemerintah daerah maupun pusat dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi, kebijakan upah minimum, serta program peningkatan kualitas tenaga kerja.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi ketenagakerjaan di daerah, khususnya faktor-faktor yang memengaruhi tingginya pengangguran. Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kesiapan menghadapi kebutuhan pasar kerja sehingga mampu memanfaatkan peluang kerja yang tersedia.